

VOX POPULI

Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

ISSN 2087-3360 eISSN 2714-7657

DEMOKRASI DAN KONFLIK

Jejaring Intelektual Jesuit dalam Membangun Semangat Kebangsaan dan Politik di Indonesia

Awal Muqsith

1-16

Post-Democracy: Prospek Demokrasi Lokal Kabupaten Gowa Pasca Pilkada Serentak 2020

*Muh. Wahyu, Muh. Nur Yamin Firdauzi Harapap,
Muh. Adi Daya Pandu Buana, Febrianto Syam*

17-26

Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba

*Rana Dwi Puti Alham, Wiwi Wijayanti, Miftahul Jannah,
Reskiyanti Nurdin, Zulfiani*

27-38

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pangkajene dan Kepulauan Tanun 2020

Nita Vibrianti, Nurul Islamia Aulia, Nurul Sahfitri, Syahrir Karim

39-47

Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Jeneponto

*Mursalim Muttar, Dewi Riskawati Hamzah,
Muh. Idris Syam, Anggriani Alamsyah, Nur Utaminingsih*

48-56



Dipublikasikan Oleh
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020

Nita Vibrianti, Nurul Islamia Aulia, Nurul Sahfitri, Syahrir Karim

Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

e-mail: nitaavibrianti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Pangkep 2020. Adapun tujuan: 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Pangkep 2020. 2) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dan seberapa besar pengaruh lingkungan masyarakat dalam partisipasi politik masyarakat kabupaten Pangkep dalam Pilkada 2020. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Pangkep 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Pangkep 2020 mengalami peningkatan dibanding partisipasi politik saat Pileg dan Pilpres tahun 2019. Peran strategis lembaga-lembaga, baik Lembaga pemerintah, social maupun politik menjadi penyebab utama tingginya partisipasi pemilih di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selain itu juga pengaruh lingkungan sangat menentukan tingginya partisipasi politik warga. Partisipasi politik sekitar 83,29% , dan dominansi pemilih paling banyak adalah kaum milenial dengan rentang usia 17-30 tahun berada dikisaran 45% hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Pangkep pada Pilkada 2020 ini terbilang mengalami peningkatan yang signifikan.

Kata Kunci :

Partisipasi Politik, Pilkada, Pangkejene dan Kepulauan

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bagian dari implementasi demokrasi di tingkat lokal. Pilkada langsung telah berjalan sejak tahun 2005 yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 tahun 2004 pasal 18 ayat 4 yang berbunyi “gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi dan kota dipilih secara demokratis. Sejauh ini, pesta

demokrasi yang digelar dan proses rekrutmen seringkali tidak kondusif terhadap proses politik. Semestinya berjalan secara demokratis justru mem-buruk dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti praktik *money politic* dan *balck campaign* dalam proses penyelenggaraan Pilkada.

Sejarah mencatat bahwa selama proses Pilkada diselenggarakan di Indonesia,

tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami pasang surut. Padahal, tingkat partisipasi politik merupakan salah satu indikator matangnya demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin ikut terlibat dalam kegiatan itu.¹

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) telah 4 kali melaksanakan Pilkada yaitu pada tahun 2005, 2010, 2015, dan 2020. Pada Pilkada tahun 2020 diikuti oleh 4 paslon dari partai Gerindra, Nasdem, PDI-P dan Golkar. Pilkada tahun 2020 ini dimenangkan oleh pasangan calon H. Muhammad Yusran Lalogau dan Syahban Sammana dari partai Nasdem dengan total perolehan suara sebanyak 72.973 atau 36,78% dari total suara sah.² Tingkat partisipasi politik di Kabupaten Pangkep pada Pilkada 2020 mengalami peningkatan dibanding Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dilaksanakan pada tahun 2019. Jumlah penduduk Kabupaten Pangkep sendiri di tahun 2020 berdasarkan hasil data sensus penduduk 2020 sebanyak 3345.775 jiwa bertambah sekitar 40.038 jiwa dibandingkan dengan tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk pertahun 2010- 2020 1,27% , dengan komposisi

penduduk usia produktif (15-64 tahun) 67,55% dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) 6,18%.³ Artinya bahwa penduduk Pangkep yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah sadar akan pentingnya menggunakan hak pilihnya.

Adapun yang melatarbelakangi pengambilan tema partisipasi politik pada Pilkada Pangkep 2020 yaitu karena terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat yang cukup signifikan pada Pilkada 2020 dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg tahun 2019 dan juga pada Pilkada ditahun 2015. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba melihat sejauhmana peran lembaga politik dan sosial serta pengaruh lingkungan dalam mendorong partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Pangkep 2020.

KAJIAN PUSTAKA

Tia Subekti dalam penelitiannya tentang *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum: Studi Turn Of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*. Menurutnya dalam upaya peningkatan partisipasi politik terdapat empat lembaga sosial yang berperan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat. Di Magetan sendiri pada tahun 2013 mengalami peningkatan persentasi keterlibatan publik pada proses Pemilukada sebanyak 72%. Salah satu temuan kunci Tia Subekti bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi

¹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.368.

²KPU Pangkep, "Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pilkada Pangkep 2020" dalam <https://kpu-pangkep.kab.go.id/2021/02/18/pengumuman-penetapan-pasangan-calon-terpilih-pada-pilkada-pangkep-2020/> diakses 22 Juni 2021.

³Badan Pusat Statistika, "Jumlah dan Distribusi Penduduk" dalam <https://pangkep.kab.go.id/statistable.html> diakses 22 Juni 2021.

oleh massifnya praktik politik uang menjelang Pemilukada.⁴

Keli Rizkiantomo dalam penelitiannya *Faktor Dominan Yang Menentukan Pilihan Politik Masyarakat Desa Masin Dalam Pemilihan Bupati Batang Tahun 2017*. Menurutnya ada beberapa alasan masyarakat menggunakan hak pilih pada Pilkada Batang tahun 2017, di antaranya: (1) Pendekatan sosiologis, yaitu karena keluarga, hubungan kekerabatan, kesamaan sekolah, pekerjaan, lingkungan bergaul dan organisasi keagamaan. (2) Pendekatan psikologis yaitu karena faktor identifikasi partai. (3) Pendekatan rasional yaitu karena faktor rekam jejak, adanya keuntungan yang diharapkan pemilih kepada kandidat. (4) Faktor visi misi. (5) Faktor marketing yang dilatarbelakangi karena faktor citra kandidat, isu dan kebijakan.⁵

Sebagai pembeda, tulisan ini mencoba memaparkan dan menggali bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik dan mencoba mendeskripsikan bagaimana lingkungan berpengaruh dalam menentukan pilihan.

⁴Tia Subekti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 1 (2014).

⁵Keli Rizkiantomo, "Faktor Dominan Yang Menentukan Pilihan Politik Masyarakat Desa Masin Dalam Pemilihan Bupati Batang Tahun 2017". *Skripsi* (Semarang: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), h. 83.

TINJAUAN TEORETIS

Partisipasi Politik

Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata "part" yang berarti bagian dan jika kata "part" dikembangkan menjadi kata kerja maka akan menjadi "to participate" yang maknanya turut ambil bagian.⁶ Definisi umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung, dapat juga berkaitan dengan bagaimana memengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*).⁷ Partisipasi politik dalam Pilkada dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala bentuk keputusan untuk menentukan pilihan. Partisipasi merupakan merupakan kegiatan individu atau kelompok yang ikut serta dalam memilih pemimpin. Keikutsertaan suatu kelompok sangat berpengaruh besar dalam pemilihan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Partisipasi politik dalam penelitian ini menjadi landasan konseptual sekaligus menjadi pisau analisa dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Partisipasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini khusus melihat partisipasi warga dalam pemilihan, baik di pilpres, pileg maupun pilkada.

⁶Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 177.

⁷Miriam Budiarto, 2008, h. 367.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana datanya berbentuk deskriptif. Data yang diambil berupa hasil wawancara dan juga bahan tertulis yang menjelaskan mengenai upaya meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada Pangkep dan juga bagaimana lingkungan menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan.

PEMBAHASAN

Peran Lembaga Politik dan Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Lembaga sosial di masyarakat adalah memberikan pedoman bersikap atau bertingkah laku pada masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, dan memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Lembaga sosial berperan memberikan arahan bagaimana seharusnya berperilaku. Lembaga sosial ada dikarenakan kebutuhan masyarakat. Lembaga sosial juga berperan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dikarenakan lembaga sosial mampu memberikan dorongan pada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam politik. Tercatat ada beberapa lembaga sosial yang mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Pangkep antara lain, yaitu Bawaslu, KPU Kabupaten, Partai Politik, Media Massa dan organisasi yang berada dimasyarakat (Ormas).

Pertama, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mana bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

“Sebagaimana tugas dari Bawaslu yaitu mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu adapun upaya Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi politik yaitu pertama, setiap hari jumat datang ke mesjid menyampaikan kepada jamaah atau masyarakat. Kedua, menyebarkan brosur baik dari Bawaslu maupun dari Bawascam. Bawascam sendiri melakukan beberapa kegiatan untuk mengundang masyarakat dan kegiatan ini dilaksanakan hingga Pilkada selesai agar situasi bisa lebih tenang. Ketiga, membuat sebuah iklan dalam mempromosikan terkait undang-undang yang membahas tentang pelanggaran money politic.”⁸

Kedua, KPU Kabupaten sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang, merencanakan penyelenggaraan pemilihan, menetapkan tanggal dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan. Peran KPU tentunya sangat menentukan dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih. Hal ini sangat terkait dengan tugas dan fungsi KPU untuk terlaksananya pemilihan dengan sukses dan lancar, dan salah satu indikator suksesnya sebuah pemilihan adalah tingkat partisipasi pemilih secara maksimal.

Ketiga, Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.⁹ Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orinetasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.¹⁰ Salah satu tujuan dan fungsi partai politik adalah meningkatkan

⁸Samsir Alam, Ketua Bawaslu Kab. Pangkep, wawancara, 27 Mei 2021.

⁹Miriam Budiarto, 2008, h. 397.

¹⁰Miriam Budiarto, 2008, h. 404.

partisipasi politik di dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, dinyatakan bahwa tujuan dan fungsi partai politik yaitu (1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang. (2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Tujuan khususnya adalah (1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. (2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹

“Dari partai upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi secara massif ke masyarakat dari tim partai yang terstruktur. DPD kabupaten, kecamatan hingga tingkat ranting desa dan kelurahan. Tim pemenang juga melakukan hal yang sama dari tim menyusun schedule sosialisasi yang menghadirkan calon itu dilakukan agar masyarakat percaya. Melakukan kampanye secara aktif di sosial media.”¹²

Keempat, media massa adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk

¹¹Republik Indonesia. “UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik” dalam https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_2.pdf diakses pada 20 juni 2021

¹²Abdul Kadir, Sekretaris DPP Partai Nasdem Pangkep, wawancara, 28 Mei 2021.

melakukan komunikasi antar individu. Pada Pilkada Pangkep 2020 media massa mempunyai peran dalam meningkatkan partisipasi politik terlebih lagi dikarekan adanya wabah covid19 jadi ruang untuk berkampanye secara langsung dilingkungan masyarakat menjadi terbatas sehingga banyak kandidat yang menggunakan media massa sebagai alat kampanye.

“Media massa memiliki andil dan peran dalam peningkatan partisipasi politik. Setiap media massa memiliki pembaca mereka. Apalagi di ruang media sosial jika dilihat, penyelenggara Pilkada maupun calon tidak akan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat atau publik karena diketahui profesi atau sebuah kegiatan untuk informasi bagi publik atau masyarakat hanya bisa diperankan oleh media massa melalui pemberitaan. Secara umum, pada Pilkada serentak 2020 tentu saja menarik, karena Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19. Secara aturan penyelenggara bahkan calon dibatasi ruang geraknya. Sehingga media ikut mengawasi aturan-aturan tersebut yang terkait covid-19 tentu saja harus mengikuti protokol kesehatan.”¹³

Kelima, peran *civil society* (organisasi kemasyarakatan). Organisasi masyarakat atau ormas memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan partisipasi politik dengan cakupannya yang luas di masyarakat dan hampir seluruh tugas negara dilakukan oleh ormas kecuali tugas pertahanan. Pemuda Pancasila Pangkep, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan lainnya adalah ormas yang berpartisipasi dalam peningkatan partisipasi politik pada Pilkada Pangkep 2020.

¹³Badauni AP., Sekretaris Pangkep TV, wawancara, 16 Juni 2021.

“IPPM Pangkep adalah organisasi kepemudaan Pangkep yang memiliki peran yang cukup sentral dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada Pangkep 2020 peran IPPM Pangkep dalam pesta demokrasi tahun kemarin yaitu IPPM memiliki naungan massa yang cukup besar tapi disamping itu IPPM Pangkep tidak pernah berpihak terhadap salah satu paslon (bersikap netral) sesuai anggaran rumah tangga, pasal 3 yang berbunyi status organisasi bersifat independen.”¹⁴

Selain itu, IPPM Pangkep ikut mendeklarasikan mengenai Pilkada Pangkep yang damai yang dilakukan oleh demisioner Ketua Umum IPPM Pangkep 2018-2020, Wahyu Rifqi. Artinya IPPM ikut mensosialisasikan dan mengajak masyarakat dan utamanya kader IPPM Pangkep untuk ikut menggunakan suaranya dan menjaga kedamaian Pilkada Pangkep 2020.¹⁵

Sebagai organisasi kemahasiswaan untuk daerah, IPPM tetap menjadi peran sentral dalam mencerdaskan pemilih. Hal ini dimulai dari lingkungan internalnya dalam membuat sosialisasi dan pelatihan-pelatihan.

Pengaruh Lingkungan Terhadap Partisipasi Politik Pada Pilkada Pangkep 2020

Lingkungan sosial adalah lingkungan di mana segala aktivitas sehari-hari dilaksanakan dan keadaan lingkungan sosial

yang setiap saat berubah mampu mempengaruhi perilaku seseorang. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik ternyata membuahkan hasil meskipun di tengah keterbatasan di masa pandemi Covid-19. Seperti yang diketahui bahwa manusia adalah makhluk yang unik yang memiliki kecenderungan untuk berfikir secara irasional dan rasional. Hubungannya dengan Pilkada Pangkep, ketika individu menggunakan rasionalitasnya dalam menentukan pilihannya tentu hal itu tidak semata-merta terjadi, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya dan salah satunya adalah pengaruh dari lingkungan.

Lingkungan sosial terbagi atas lima yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan pertemanan dan lingkungan masyarakat. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara mengenai pengaruh lingkungan terhadap pengaruh pilihan politik dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang sangat mempengaruhi seseorang dalam menentukan hak pilihnya yang paling pertama adalah lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat dan lingkungan pertemanan dan lingkungan kerja.

“Berbicara mengenai lingkungan keluarga, yah memang keluarga membawa pengaruh besar bagi pribadi dalam tentukan hak pilih, perbedaan pilihan dalam keluarga mungkin hal yang wajar tapi ketika entah itu saudara atau orang tua dapat info mengenai salah satu kandidat pasti dibahas di rumah bahwa si kandidat bahwa dia ini beginiki, visinya begini bagus tawwa, jadi kita pribadi biasanya langsung juga terpengaruh mendengar hal itu, kalau dilingkungan kerja saya sendiri yang banyak bawa

¹⁴A.Fikran Walid Ramadhana, Kabid 2 IPPM Pangkep, wawancara, 15 Juni 2021.

¹⁵Rifai, “IPPM Pangkep deklarasi Pilkada damai 2020 di kabupaten Pangkep” dalam <https://diskominfo.PangkepKab.go.id/index.php/berita/item/950-ippm-Pangkep-deklarasi-Pilkada-damai-2020-di-kabupaten-Pangkep> diakses 20 Juni 2021.

pengaruh tentu itu dari rekan- rekan kerja tapi kan kita harus profesional juga kalau di tempat kerja dan yang terpenting sih menurut saya kalau mau memilih kandidat itu cari tau dulu apa visi misinya dia, pokoknya latar belakangnya lah dan kalau di lingkungan masyarakat, yah seperti diketahui pasti disatu kelurahan pasti itu ada yang namanya tim suksesnya lah yang cari-cari suara dan lakukan sosialisasi kalau jago meyakinkan pasti kita yang awalnya pilih si A eh akhirnya malah pilih si B”¹⁶

Lingkungan pertemanan di mana seorang individu dapat berinteraksi satu sama lainnya dengan orang yang dekatnya selain keluarga, nyatanya dalam lingkungan pertemanan merupakan salah satu faktor yang menentukan bagaimana, apa dan siapa kandidat yang akan dipilihnya. Dalam lingkungan pertemanan suatu informasi mengenai kandidat dapat dibicarakan entah dari segi visi misinya maupun hal lainnya mengenai kandidat tersebut. Hal ini dapat membuat seseorang lebih berfikir secara rasional dalam memilih kandidat.

Dalam lingkungan masyarakat juga yang dapat mempengaruhi partisipasi politik dalam menentukan pilihan yaitu adanya kultur. Kultur tidak pernah lepas dari alam pikir dan tindakan manusia baik secara individu maupun organisasi sehingga kita bisa melihat potongan dan irisan antara respon politik sebagai pribadi dan sebagai kesatuan komunitas atau perilaku komunitas.¹⁷ Budaya politik melekat baik pada masyarakat dengan sistem politik tradisional, transisional, maupun modern.

¹⁶Rahmawati, Staf Kantor Dinas Pemerintah, wawancara, 18 Mei 2021.

¹⁷David Efendi, “Kultur Politik Sehari-hari dan Kita” dalam <http://davidefendi.staff.umsy.ac.id/2013/08/05/kultur-politik-sehari-hari-dan-kita/> diakses 23 Juni 2021.

Budaya politik merupakan persepsi warga negara yang diaktualisasikan dalam pola sikap terhadap masalah politik dan peristiwa politik yang terjadi sehingga berdampak terhadap pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah karena sistem politik merupakan hubungan antar manusia yang menyangkut soal aturan dan wewenang.¹⁸ Kultur yang ada dalam lingkungan partisipasi politik ini berdasarkan pengetahuan, adat istiadat, norma yang ada dan berlaku. Budaya politik *kaula* (*subject political culture*) merupakan suatu komunitas tertentu yang cukup maju, baik dari kehidupan sosial maupun perekonomiannya, namun sikapnya masih pasif dalam politik.¹⁹ Mungkin inilah menjadi faktor mengapa masih banyak masyarakat yang memilih untuk tidak terlibat dalam proses politik di tingkat lokal.

Salah satu isu yang banyak berkembang di masyarakat ketika akan menentukan pilihan yaitu mengenai isu putra daerah. Putra daerah dianggap sebagai salah satu infestasi yang mampu menjadi sosok pemimpin bagi suatu daerah karena telah banyak mengetahui daerah tersebut.

“Kalau di Indonesia karakter pemilihnya bukan ideologis dan untuk mengukur hal tersebut kita tidak punya alat tolak ukur, tapi ketika berbicara teori empiris maka faktanya menceritakan bahwa di Kabupaten Pangkep hampir tidak ada pemilih yg ideologis, kita tak memiliki pemilih yang ideologis, masyarakat hanya menganggap bahwa momentum Pilkada hanya sebagai kegiatan seremonial hanya untuk

¹⁸Aim Abdul Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), h. 3.

¹⁹Fadhillah Harnawansyah, *Sistem Politik Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 69.

*menggugurkan hak kewajiban dalam pemilihan dan mengenai politik uang itu pasti ada terjadi dan tetap berjalan di masyarakat akan tetapi berbicara mengenai pelanggaran, begini dalam bahasa hukum ada perbuatan dan ada pelanggaran, pelanggaran itu ketika mampu dinyatakan dan dibuktikan bahwa itu pelanggaran dan kan hukum saja yang mengatakan bahwa itu pelanggaran, berbicara mengenai dugaan pelanggaran dulu, bagi-bagi duit ya mungkin menurut kita bisa saja money politic tapi ketika dikaji dan ada unsur yang tidak terpenuhi akhir bukan menjadi pelanggaran tetapi menjadi perbuatan tapi bukan pelanggaran.*²⁰

Pengaruh lingkungan di atas menjadi penentu dalam partisipasi pemilih. Hal ini disadari bahwa lingkunganlah yang membentuk karakter pemilih. Sehingga hal ini bisa menjadi pertimbangan khususnya para penyelenggara untuk memberi perhatian khusus terkait peran strategis lingkungan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Pendidikan politik di lingkungan keluarga, sekolah, dan organisasi menjadi penting dalam membentuk karakter dan perilaku pemilih.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik lembaga politik dan sosial sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan partisipasi politik pada Pilkada Pangkep 2020. Ada beberapa lembaga sosial yaitu Bawaslu, KPU Kabupaten, Partai Politik, Media Massa dan juga ormas kepemudaan, seperti IPPM Pangkep.

²⁰Samsir Alam, Ketua Bawaslu Pangkep, wawancara, 27 Mei 2021.

Pengaruh lingkungan terhadap partisipasi politik dalam menentukan pilihan sangatlah berpengaruh utamanya dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat kultur. Kultur yang ada dalam lingkungan partisipasi politik ini berdasarkan pengetahuan, adat istiadat, norma yang ada dan berlaku dan isu mengenai putra daerah seringkali menjadi salah satu hal yang tertanam dimasyarakat dalam memilih dan menentukan kandidat. Dan budaya politik kaula (*subject political culture*) merupakan suatu komunitas tertentu yang cukup maju, baik dari kehidupan sosial maupun perekonomiannya, namun sikapnya masih pasif dalam politik. Munculnya budaya politik kaula dimasyarakat Pangkep dimana beberapa persen masyarakat Pangkep tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya isu pemerintahan monarki karena melihat dari silsilah hubungan antara bupati terpilih saat ini dengan mantan wakil bupati sebelumnya ada hubungan kekeluargaan diantara mereka. Budaya politik pada dasarnya di masyarakat untuk menciptakan suatu masyarakat yang beradab dimana dalam pergaulan hidup antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aim Abdul Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006).
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010).
- Fadhillah Harnawansyah, *Sistem Politik Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

Keli Rizkiantomo, "Faktor Dominan Yang Menentukan Pilihan Politik Masyarakat Desa Masin Dalam Pemilihan Bupati Batang Tahun 2017". *Skripsi* (Semarang: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang).

Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Tia Subekti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 1 (2014).

Website

Badan Pusat Statistika, "Jumlah dan Distribusi Penduduk" dalam <https://pangkepkab.bps.go.id/statictable.html> diakses 22 Juni 2021.

David Efendi, "Kultur Politik Sehari-hari dan Kita" dalam <http://davidefendi.staff.umy.ac.id/2013/08/05/kultur-politik-sehari-hari-dan-kita/> diakses 23 Juni 2021.

KPU Pangkep, "Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pilkada Pangkep 2020" dalam <https://kpu-pangkepkab.go.id/2021/02/18/pengumuman-penetapan-pasangan-calon-terpilih-pada-pilkada-pangkep-2020/> diakses 22 Juni 2021.

Republik Indonesia. "UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik" dalam https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_2.pdf diakses pada 20 juni 2021

Rifai, "IPPM Pangkep deklarasi Pilkada damai 2020 di kabupaten Pangkep" dalam <https://diskominfo.Pangkepkab.go.id/index.php/berita/item/950-ippm-Pangkep-deklarasi-Pilkada-damai-2020-di-kabupaten-Pangkep> diakses 20 Juni 2021.

Wawancara

A.Fikran Walid Ramadhana, Kabid 2 IPPM Pangkep, *wawancara*, 15 Juni 2021.

Abdul Kadir, Sekretaris DPP Partai Nasdem Pangkep, *wawancara*, 28 Mei 2021.

Badauni AP., Sekretaris Pangkep TV, *wawancara*, 16 Juni 2021.

Rahmawati, Staf Kantor Dinas Pemerintah, *wawancara*, 18 Mei 2021.

Samsir Alam, Ketua Bawaslu Kab. Pangkep, *wawancara*, 27 Mei 2021.

PETUNJUK PENULISAN JURNAL VOX POPULI

1. Topik yang akan dipublikasikan oleh jurnal Vox Populi (Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Maassar) berhubungan dengan Politik Islam, Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik, Gerakan Sosial, Politik Lokal, Pemerintahan dan topik lain yang diangkat dalam skripsi mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin yang memuat unsur kebaruan, baik dalam bentuk kumpulan/akumulasi pengetahuan baru, pengamatan empirik atau hasil penelitian, dan pengembangan gagasan atau usulan baru.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau bahasa Inggris, belum pernah dipublikasikan serta bebas dari unsur plagiat.
3. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman.
4. Jumlah kata berkisar 6000 - 8000 kata. Artikel yang jumlah kata lebih dari itu namun dianggap perlu diketahui oleh publik maka akan dipertimbangkan dan dimuat setelah mendapat persetujuan dari Tim Editor.
5. Tabel dan gambar harus diberi identitas yang berupa nomor urut dan judul tabel atau gambar yang sesuai dengan isi tabel atau gambar, serta dilengkapi dengan sumber kutipan.
6. Redaksi berhak menolak naskah yang tidak memenuhi kriteria/persyaratan teknis, mengadakan perubahan susunan naskah, memperbaiki bahasa dan berkonsultasi dengan penulis sebelum naskah dimuat.
5. Sistematika penulisan naskah, terdiri dari:

- **a. Judul**

Ukuran font untuk judul artikel adalah 18 point, dan font pada isi 12 point. Judul maksimal 12 kata dalam bahasa Indonesia atau 10 kata dalam Bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas, dengan menggunakan kata-kata yang ringkas, lugas, tepat, jelas dan mengandung unsur-unsur yang akan dibahas.

- **b. Nama Penulis, Institusi dan Email**

Nama penulis ditulis di bawah judul sebelum abstrak tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain, asal lembaga tempat penulis bernaung dan alamat *email* untuk korespondensi dengan ukuran 11 point.

- **c. Abstrak dan kata kunci**

Abstrak menggunakan kata kisaran 150-200 kata berbahasa Indonesia dicetak miring dengan Times New Roman 11point. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

- **d. Pendahuluan**

Pendahuluan ditulis dengan Times New Roman 12 point. Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya, dan kontribusi yang diberikan dari makalah ini. Pendahuluan harus menggambarkan dengan jelas latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah, literatur-literatur yang relevan dengan dengan subjek penelitian, pendekatan yang akan digunakan, serta nilai kebaruan yang akan dihasilkan. Bagian ini juga penulis mesti memberi argument tentang pentingnya penelitian dilakukan. Istilah-istilah asing dicetak *miring (italic)*.

- **e. Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini semaksimal mungkin berisi uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- **f. Tinjauan Teoretis**

Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- **g. Metode Penelitian**

Bagian ini memaparkan metode penelitian yang digunakan, di antaranya desain dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan dan analisis data. Metode penelitian dipaparkan dalam bentuk narasi tanpa membuat sub bagian.

- **h. Hasil dan Pembahasan**

Bagian Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data hasil penelitian. Bagian ini diharapkan memberikan penjelasan ilmiah yang secara logis dapat menerangkan alasan diperolehnya hasil-hasil tersebut yang dideskripsikan secara jelas, lengkap, terinci, terpadu, sistematis, serta berkesinambungan.

Penulis menyusun secara sistematis disertai argumentasi yang rasional tentang informasi ilmiah yang diperoleh dalam penelitian, terutama informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara ilmiah, hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian dapat berupa temuan baru atau perbaikan, penegasan, atau penolakan interpretasi suatu fenomena ilmiah dari peneliti sebelumnya. Untuk memperjelas penyajian, hasil penelitian disajikan secara cermat agar mudah dipahami, misalnya dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel, kurva, grafik, gambar, foto, atau bentuk lainnya sesuai keperluan secara lengkap dan jelas.

- **i. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan tepat tentang apa yang diperoleh, memuat keunggulan dan kelemahan, dapat dibuktikan, serta terkait langsung dengan tujuan penelitian. Uraian pada bagian ini harus merupakan pernyataan yang pernah dianalisis/dibahas pada bagian sebelumnya, bukan pernyataan yang sama sekali baru dan tidak pernah dibahas pada bagian sebelumnya, serta merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Bagian ini tidak perlu ada uraian penjelasan lagi.

- **g. Daftar Pustaka**

Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu dalam naskah. Cara penulisan disesuaikan dengan *gaya selingkung Vox Populi*.

GAYA SELINGKUNG JURNAL VOX POPULI

CATATAN KAKI (*FOOTNOTE*)-*Tidak menyertakan gelar akademik pengarang*

BUKU

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

ARTIKEL DALAM BUKU

¹Tom B. Bottomore, “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 24.

ARTIKEL DALAM JURNAL

¹Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679.

ARTIKEL PADA MEDIA MASSA

¹Masdar F. Mas’udi, “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

ARTIKEL DARI INTERNET

¹Noer Fauzi Rachman, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> diakses 31 Mei 2018.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

¹Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”, *Skrripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h. 10.

DOKUMEN RESMI

¹Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents_/7.7.perkara.nomor.14-puu-2013.23.jan.2014.pemilu.presiden_\(pdf\)](https://www.bphn.go.id/data/documents_/7.7.perkara.nomor.14-puu-2013.23.jan.2014.pemilu.presiden_(pdf)) diakses 1 Juli 2019.

WAWANCARA

¹Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

ATURAN PENULISAN *FOOTNOTE* BERULANG

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David & Julia, 1991, h. 189.

⁴Thandike, 2007, h. 680.

Catatan

- Jika mengutip sumber rujukan yang sama, cukup menulis nama depan pengarang, tahun dan halaman. (Begitupun jika terdapat nama pengarang yang sama dan hanya dibedakan tahun dan halaman).
- Namun jika terdapat nama pengarang yang sama dan tahun yang sama, maka cukup diberi kode “a” atau “b” setelah tahun penerbitan.
- **Contoh**

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991b), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David Jarry & Julia Jarry, *Being Urban: A Sociology of City Life* (Chicago: Univesity of Chicago Press, 1991a), h. 10.

³David & Julia, 1991a, h. 189.

⁴David & Julia, 1991b, h. 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Daftar pustaka mengikuti gaya penulisan *catatan kaki*, namun tidak menyertakan nomor halaman.
- Daftar Pustaka disusun secara alfabetis menurut abjad nama-nama pengarang.
- Jika ada dua atau lebih karya tulis dari pengarang yang sama, maka karya dengan tahun penerbitan paling awal yang ditempatkan lebih awal dalam daftar pustaka.